KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK								
		H.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 0 0 3 0 4			H.4 X	H.4 X Final		
		H.2 X Pembetulan Ke- 0 H.3 Pembatalan			H.5 Tidak Final			
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG								
A.1 NPWP	: 7989	RIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG T						
A.2 NIK :								
AS Nama : AFRIANSYAH, AMD.KEP.								
B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG								
MASA PAJAK (mm-yyyy)	KODE OBJEK PAJAK	BRUTO		TINGGI 20% (TIDAK BER-				
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6	B.7		
2	21-402-01	940.400	940.400	0	5	47.020		
Nama Dokumen Faktur Pajak Tanggal 2 3 dd 0 2 mm 2 0 2 2 yyyy B.9 PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB. Nomor: Tanggal dd mm yyyyy B.10 PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan: B.11 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan:								
C.1 NPWP Instansi Pemerintah : 9 5 3 3 5 0 1 6 2 7 2 2 0 0 0								
C.2 Nama Instansi Pemerintah : RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR								
C.3 ID Subunit Organisasi :			$oxed{\bot}oxed{\bot}oxed{\bot}oxed{\bot}$					
C.4 Tanggal :		2 3 dd 0 2 mm 2 0 2 2 yyyy						
C.5 Nama Penandatangan : HARI JUMADI								
C.6 Pernyataaı	ո Wajib Pajak <u>։</u>	Dengan ini saya menyatakan b tandatangani secara elektronik	ahwa bukti Pemotongan/Pemungu	tan Unifikasi telah sa	ya isi dengar	ı benar dan telah saya		
		Sesuai dengan ketentuan yang elektronik sehingga tidak diperi	j berlaku, Direktorat Jenderal Pajak lukan tanda tangan.	t mengatur bahwa do	kumen ini tel	ah ditandatangani secara		

SLLNF06J